

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan dana pembangunan yang besar. Salah satu sumber dana pembangunan adalah penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan merupakan hal yang wajar karena penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas terutama didukung dengan penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan bertugas untuk mengelola pajak.

Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangya dengan mencari kelemahan peraturan (Hutagoal, 2007:155). Penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan cara melakukan penghematan pajak yang masih dalam koridor perundang-undangan (*lawful fashion*).

Dalam penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Karena tindakan penghindaran pajak ini dianggap *legal*, perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara agar dapat mengurangi besaran laba yang dilaporkan pada laporan keuangan, sehingga besar pajaknya pun nantinya juga akan berkurang.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 menunjukkan bahwa dari sekitar 110,8 juta orang yang bekerja, baru 24,13 juta orang atau 21,7% yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Pembayar pajak hanya 670 ribu WP atau 2,7%-nya sehingga menyebabkan minimnya WP yang membayar pajak ataupun yang melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang dimilikinya.

Penelitian mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah dilakukan oleh Dewi dan Jati (2013), Jaya dkk., (2013), Fadhilah (2013), Kurniasih dan Sari (2013), Dyreng dkk., (2010), Budiman (2012), Annisa dan Kurniasih (2012), dan Hormati (2012), dan Surbakti (2012). Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain karakteristik eksekutif, karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan, dan konservatisme. Beberapa alasan menggunakan variabel tata kelola perusahaan dan konservatisme dikarenakan masih sedikitnya penelitian yang menggunakan konservatisme serta adanya hasil yang tidak konsisten dalam penggunaan variabel tata

kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak di dalam penelitian Dewi dan Jati serta Fadhilah.

Karakteristik eksekutif berasal dari seorang pemimpin atau manajemen suatu perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi dikarenakan adanya penurunan nilai objektivitas dan keandalan laporan keuangan yang telah tersedia atas nilai aset dan liabilitas di dalam laporan posisi keuangan tersebut yang mengakibatkan pihak manajemen atau pemimpin perusahaan cenderung mengambil keputusan sendiri untuk mengurangi tingkat penurunan objektivitas dan keandalan laporan keuangan tersebut (Lewellen, 2003). Pimpinan perusahaan secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar tindakan penghindaran pajak yang dilakukan. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif (Dyrengek, 2010).

Ukuran perusahaan adalah salah satu karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas suatu entitas usaha. Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil (Hormati, 2009) Surbakti (2012) telah membuktikan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan proses yang dilakukan oleh dewan direksi untuk mengotorisasi, mengarahkan, dan mengawasi manajemen terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya perusahaan yang lebih besar dan lebih kompleks cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan ingin menekan beban pajak sehingga beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi berkurang.

Tindakan menekan beban tersebut inilah yang membuat banyak perusahaan masih melakukan penghindaran pajak dikarenakan masih dianggap *legal* oleh peraturan perpajakan. Hubungan negatif yang terjadi lebih banyak terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola perusahaan rendah, yang dalam pengelolaannya sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan, hubungan tersebut membuat ketidak konsistenan di dalam perlakuan penghindaran pajak tersebut. Baik buruknya tata kelola perusahaan yang baik tercermin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit (Desai dan Dharmapala, 2006). Annisa (2012) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak. Hasilnya komite audit dan kualitas audit yang dijadikan proksi dalam tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan

melalui dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan komite audit peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi berkurang.

Konservatisme (*conservatism*) merupakan praktik mengurangi laba (dan mengecilkan aset bersih) dalam merespon berita buruk (*bad news*), tetapi tidak meningkatkan laba (meninggikan aset bersih) dalam merespon berita baik (Basu, 1997). Konservatisme terkait dengan melaporkan pandangan yang paling tidak optimis saat menghadapi ketidakpastian, terutama pada saat terjadi keuntungan namun tidak diakui sampai benar-benar terjadi tetapi secara cepat mengakui kabar buruk (*Financial Statement Analysis*) (Subramanyam, 2014:91). Hal tersebut mengakibatkan laporan keuangan memiliki laba rendah yang berakibat rendahnya beban pajak yang dimiliki karena cepatnya mengakui kabar buruk, sehingga pada saat terjadinya laba yang benar-benar terjadi manajer atau pimpinan perusahaan tidak secara langsung menaikkan nilai dari laporan keuangan tersebut. Akibat dari perlakuan tersebut adalah beban pajak yang akan dibayar tinggi atau rendah, jika rendah kemungkinan besar perusahaan akan secara sukarela membayar pajak tersebut tetapi jika beban pajak yang diperoleh tinggi, maka perusahaan akan melakukan penghindaran pajak supaya perusahaan tidak perlu untuk membayar beban pajak yang tinggi tersebut.

Penelitian ini meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh dari ukuran perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, dan konservatisme terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini

menggunakan data perusahaan dari tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2013 dalam sektor manufaktur yang terdapat di BEI dikarenakan pada periode tersebut data yang diperoleh secara *update* dan lebih akurat. Sektor manufaktur merupakan jenis usaha yang berkembang pesat dan memiliki ruang lingkup yang sangat besar (International Bank for Reconstruction and Development, 2013). Tujuan dari penggunaan sektor manufaktur adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak untuk kelangsungan hidup perusahaan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah konservatisme berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh konservatisme berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait pengaruh ukuran perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, dan konservatisme terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan selain yang telah diperoleh sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktik

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga atau organisasi atau perusahaan dalam mengambil tindakan penghindaran pajak dalam melaporkan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atau bersangkutan serta mendorong perusahaan agar dapat menaruh perhatian besar pada praktik dan pengungkapan penghindaran pajak dan memberikan masukan mengenai penghindaran pajak

bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan penghindaran pajak tersebut bagi pimpinan perusahaan maupun manajer dalam melaporkan laporan keuangan mereka.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini mempunyai sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab dimana tiap-tiap bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis penelitian

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menggambarkan cara-cara untuk melakukan kegiatan penelitian mulai dari desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, teknik analisis data dan prosedur pengujian hipotesis.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data serta analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran yang dapat ditarik dan diberikan dari hasil yang diperoleh selama penelitian.